

Membuat Makalah Kebijakan (*Policy Paper*) dan Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) Yang Efektif

Wahyudi Kumorotomo

Lokakarya Policy Paper, LIPI

Jakarta

12 Feb 2013



Jurusan Manajemen dan
Kebijakan Publik

FISIPOL UGM

What is an argument?

An argument involves the process of establishing a claim and then proving it with the use of logical reasoning, examples, and research.

Struktur Pokok Policy Paper

- ✓ Pendahuluan
- ✓ Perumusan Masalah
- ✓ Gambaran umum
- ✓ Objek perdebatan dan pandangan yang berbeda
- ✓ Bahasan dan pembuktian
- ✓ Kesimpulan

Informasi untuk Policy Paper

1. Fakta;

Memuat data dan informasi yang dapat diuji kebenarannya secara objektif. Sifatnya murni dan bebas nilai (*value-free*)

2. Interpretasi;

Merupakan penafsiran seseorang atas fakta tertentu. Interpretasi mungkin bersifat objektif, tetapi informasi mengenai sumbernya harus jelas karena mungkin banyak unsur subjektifnya.

3. Opini;

Opini adalah pendapat atau ekspresi seseorang atas suatu masalah. Opini sifatnya bebas dan merupakan sarana penting demokratisasi. Tetapi pembuat keputusan harus cermat dalam menggunakan opini karena sifatnya yang subjektif.

Policy Paper bukan sekadar penyajian data...

“If hypothesis, data, and analysis lead to proof and new knowledge in science, shouldn't similar process lead to change in organizations?”

The answer is obvious – NO! Organizational changes (or decisions or policies) do not instantly flow from evidence, deductive logic, and mathematical optimization”.

(Edward B. Roberts: 1978)

Sistem Kebijakan Publik selalu punya ciri kompleksitas dinamis (*dynamic complexity*) karena...

- Berubah seiring waktu
- Saling tergantung
- Dipengaruhi umpan-balik
- Bersifat non-linier; struktur dominan terus berubah
- Sering ahistoris (*history-dependent*)
- *Self-organizing*
- Adaptif
- Sulit diperkirakan (*counter-intuitive*)
- Cenderung menolak perubahan kebijakan (*policy resistant*)
- Saling bertukar kemanfaatan (*trade-off*)

Strategi *Counter-Argument* dan “Menjual” Gagasan

1. Pemaksaan pendapat tidak akan produktif. Mengakomodasi pendapat yg bertentangan justru menunjukkan kredibilitas penulis makalah.
2. Pengakuan atas pendapat yg berseberangan menunjukkan bhw anda telah menelisik semua kemungkinan, memahami semua aspek, dan memiliki informasi yg cukup.
3. Ingat, tetaplah menggunakan nada yg seimbang (*balanced tone*) ketika menolak pendapat lain.
4. Bijak tetapi kokoh (*tactful yet firm*); Sekuat apapun keinginan kita untuk mengubah kebijakan, penghargaan atas tindakan perumus kebijakan yg telah dilakukan tetap penting. Banyak usulan kebijakan yang ditolak hanya karena soal bahasa dan cara penyampaian.

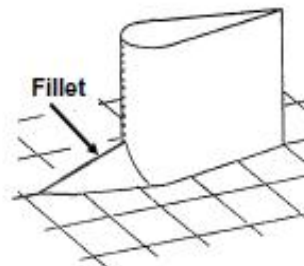
Gambar bisa sangat membantu, tetapi tidak untuk semua hal.

Fillets reduce leading edge vortices in nature
and in engineering

Fillet on dorsal fin
of shark



Fillet on Seawolf
submarine



[Devenport et al., 1991]



Contoh: Visualisasi Pendapat Yang Bertentangan



Old elites are “repositioning” (Hadiz & Robison, 2004)

Democratization is “captured” or “hijacked” by elites (Priyono et al, 2007)

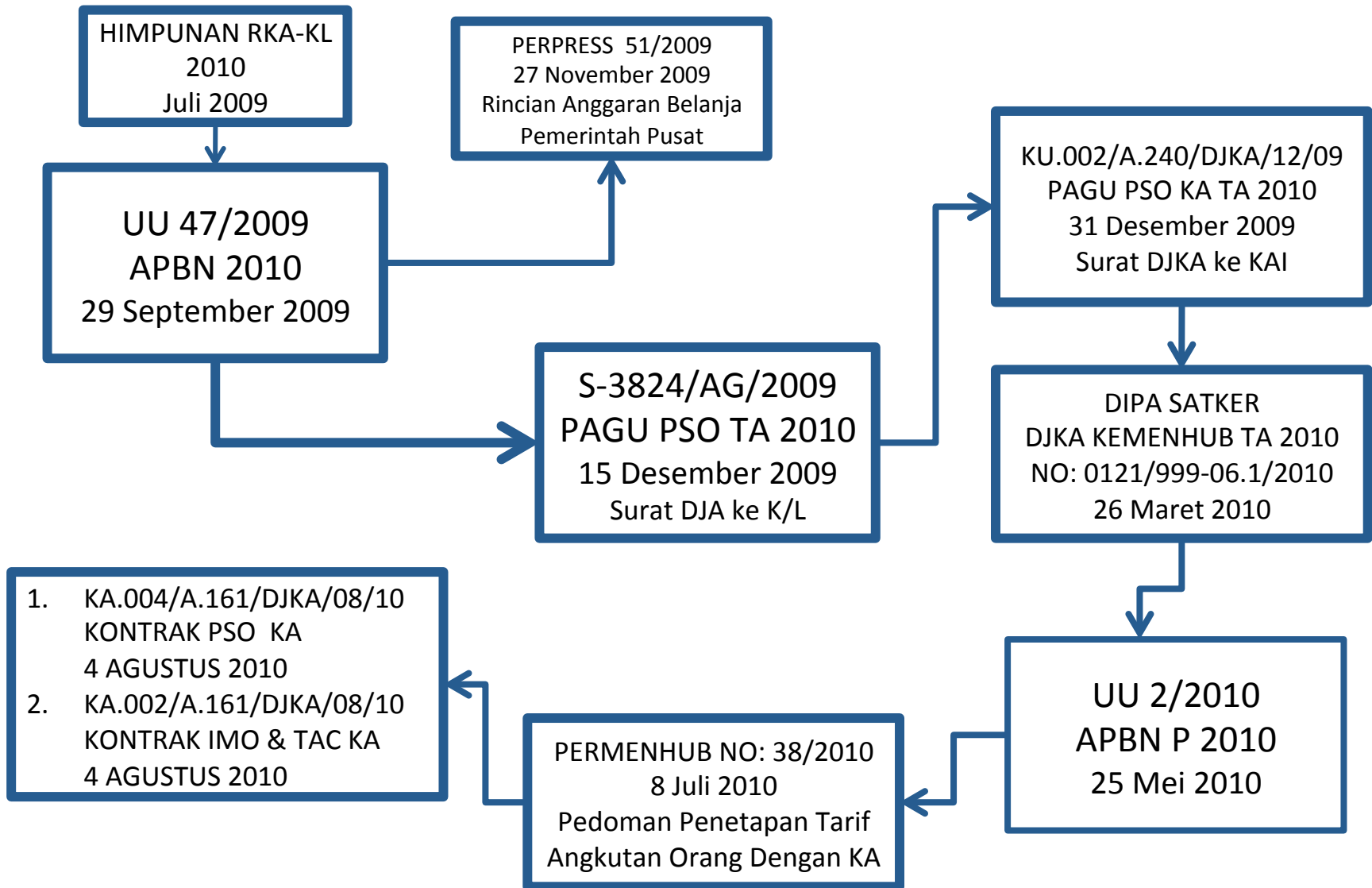


Public commitment to democracy remains solid (McLeod & MacIntyre, 2007)

New institutional environment has reshuffled the cards for political elites (Buehler, 2009)

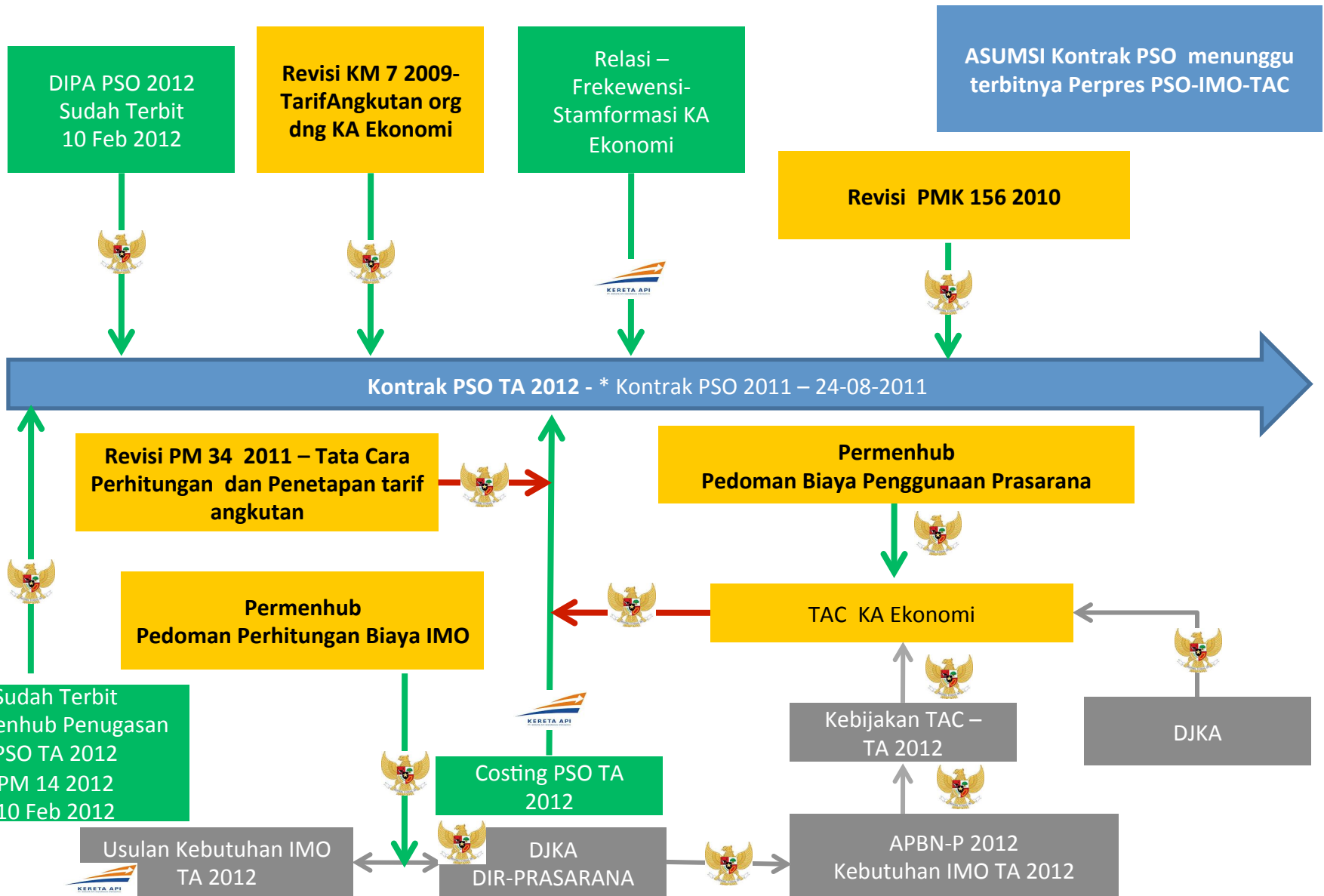


Belantara Peraturan Perundangan, Rumit Tetapi Penting



- Pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian belum diterbitkan oleh Kemenhub (Pasal 154 ayat 2 UU 23/2007)
- Kontrak 2010 belum menggunakan Permenhub KM 38/2010

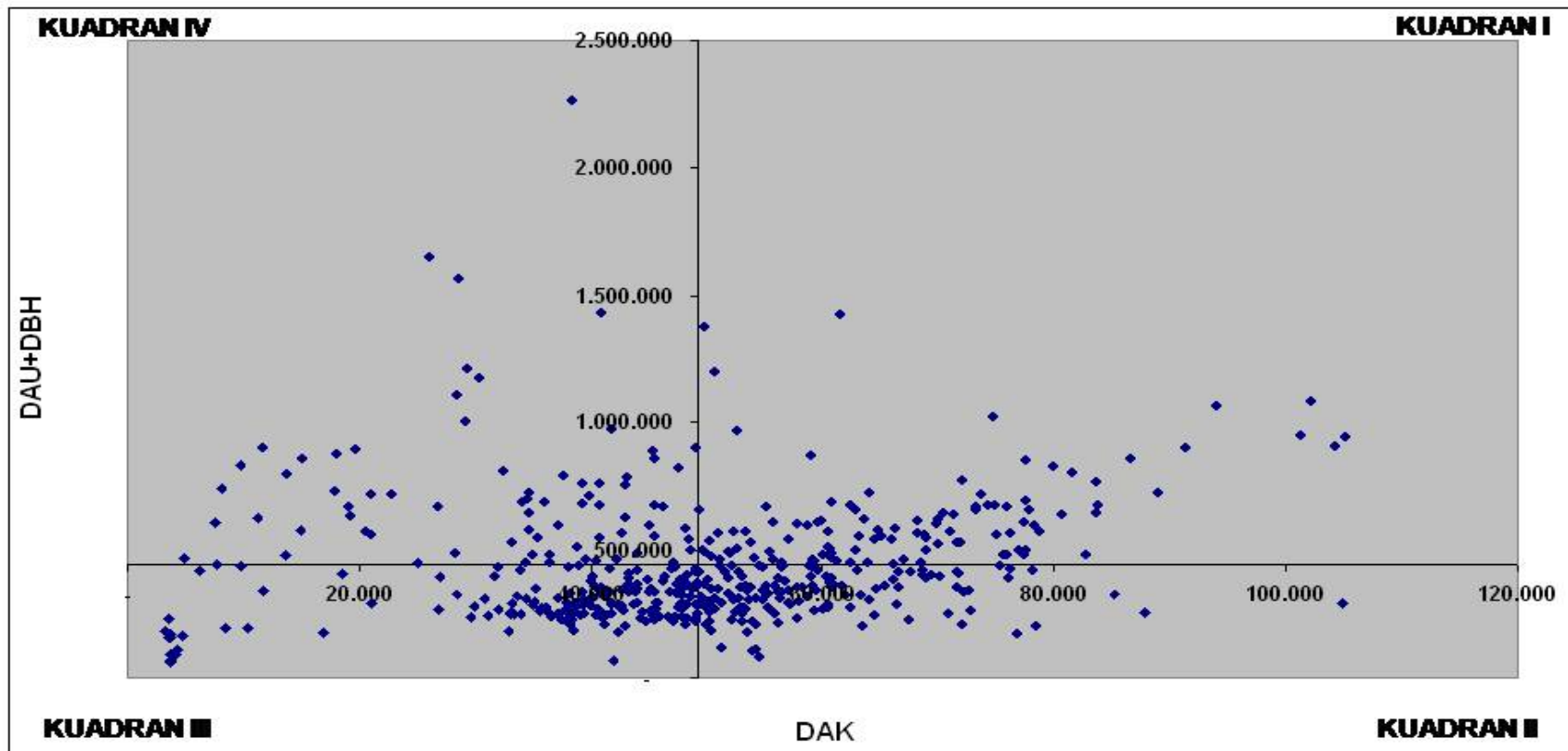
Bagan Kronologis, Membantu Memahami Arah dan Agenda Kebijakan



Grafik membantu, tetapi..

Tidak semua pejabat paham dan cukup sabar untuk mendalaminya.

KUADRAN DAK DENGAN DAU+DBH ALOKASI TAHUN 2009 (KABUPATEN/KOTA)



KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	JUMLAH
106	128	170	74	478
22,18	26,78	35,56	15,48	100

Pemetaan Stake-holders: Koordinasi dan Komunikasi Sangat Penting untuk Melakukan Perubahan

NO	URAIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN			KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	KEMEN. BUMN
		BKF	DJA	DJKN	DITJEN PERKERETAAPIAN	
1.	Revisi SKB 3 Menteri Tahun 1999	√	√		√	√
2.	Revisi PMK 156/2010	√	√		√	
3.	Penetapan Pagu PSO	√	√			
4.	Pemberian Margin	√	√			√
5.	KPA PSO KA		√			√
6.	IMO		√		√	
7.	TAC / Sewa (PP 6/2006)			√	√	
8.	Mekanisme Pengalihan (PMN) atau Pemanfaatan BMN ke PT KAI	√		√	√	
9.	Penyusunan Neraca Awal, Inventarisasi BMN dan Audit menyeluruh			√		
10.	Penyelesaian PSL	√	√	√	√	√
11.	...					

Referensi

1. Elsom Eldridge, *How to Position Yourself As the Obvious Expert*, 2004
2. Catherine F. Smith, *Writing Public Policy: A Practical Guide to Communicating in the Policy-Making Process*, 2005
3. Michael A. Stelzner, *Writing White Papers: How to Capture Readers and Keep Them Engaged*, 2006
4. Deborah Stone, *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*, 2011